

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (a) menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan yakni bahwa dapat memajukan pendidikan secara nasional. Hal itu didorong dengan adanya niat dari setiap lapisan masyarakat dan pastinya ditunjang dengan pengajar yang berkompeten di masing-masing bagiannya khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada hakikatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diterapkan pada peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi dengan dimensi pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan kewarganegaraan pada Kelas X Sekolah Menengah Atas pada kurikulum KTSP mengandung materi (bahan ajar) tentang sistem peradilan nasional memuat materi pembelajaran bagaimana sikap taat terhadap hukum atau peraturan untuk hidup tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan diri dan dilatih sejak kecil, agar terbentuk moral yang baik. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa, setiap warga negara wajib memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara berkewajiban untuk menjaga ketentraman masyarakat dan keamanan negara.

Kaitan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membina siswa agar memiliki wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta sikap cinta tanah air. Melalui pembinaan moral dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai dalam interaksi yang terjadi dengan siswa dengan perilaku-perilaku yang bermoral. Moral merupakan suatu ukuran baik-buruknya seseorang baik secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Dalam mewujudkan suatu pembentukan moral yang baik harus disertai dengan pendidikan moral yakni pendidikan yang menjadikan seorang anak bermoral.

Pendidikan moral adalah sebuah wadah pembinaan akhlak, maka perlu adanya sebuah pendekatan yang akan membawa peserta didik untuk memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dipahami oleh pendidik dan calon pendidik, diharapkan untuk mau dan mampu menjadikan para siswa sebagai warga negara yang baik. Adapun ciri-cirinya, antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri,

sederhana, terbuka dan penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat pada peraturan, dan tidak suka berbuat onar, kreatif dan inovatif, (Zuriah, 2008:134).

Berbicara moral tak lepas dari kehidupan sehari-hari, dimana mata pelajaran PKn salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang moral. Materi moral ini dibahas di Kelas X Sekolah Menengah Atas sekaligus menjadi bahan penelitian penulis, dalam hal ini siswa diharapkan memiliki sikap sadar dan taat hukum yang merupakan bagian pembentukan moral anak.

Adapun faktor yang menimbulkan kemerosotan moral anak diakibatkan kurangnya bimbingan yang mereka terima. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan dalam bidang studi dapat membantu membentuk moral siswa dalam arti pengetahuan, penghayatan dan pengamalan nilai moral Pancasila dalam kehidupannya baik sebagai individu, atau anggota masyarakat.

Menurut Dianti (2004:59, Vol.23, No.1) menjelaskan bahwa : “Pendidikan Nasional Indonesia yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menekankan tiga aspek kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor”. Untuk itu peran guru sangat berarti dalam membentuk kepribadian bukan hanya dalam lingkungan sekolah juga diluar lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak cenderung tidak begitu tertarik dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan aspek

kognitif dengan model hafalan, kurang menekankan aspek afektif dan psikomotor sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran siswa akan pentingnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembentuk moral. Siswa beranggapan bahwa mata pelajaran yang bagus adalah mata pelajaran yang sering diadakan dalam Ujian Nasional. Tanpa disadari bahwa tidak banyak mata pelajaran yang mengajarkan tentang moral dan karakter dalam sebuah teori pembelajaran yakni mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kurangnya penghayatan siswa akan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentukan moral disebabkan rendahnya kualitas guru dalam membuat suatu renovasi yang baru terhadap pembelajaran dengan cara dan metode pembelajaran yang berbeda. Guru tidak hanya memberikan pendidikan dalam bentuk materi-materi pembelajaran melainkan dituntut sebagai gambaran kepribadian bagi peserta didik yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Siti (2014:55, Vol.2, No.1) bahwa : “Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Guru merupakan orangtua siswa dalam lingkungan sekolah”.

Namun realita di sekolah masih banyak guru yang mengajar hanya sebagai kewajiban belaka, sehingga banyak siswa mengatakan bahwa guru lebih sering memberi pelajaran kepada anak sekedar materi pelajaran. Seorang guru PKn diharapkan tidak hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menanamkan kepribadian baik kepada peserta didik. Guru belum bisa dikatakan sukses

mendidik, jika peserta didik hanya memiliki kecerdasan intelektual. Guru dikatakan sukses, jika peserta didiknya memiliki kecerdasan intelektual dan ahlak yang baik. Sehingga siswa akan mencintai betapa pentingnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Persepsi siswa merupakan cerminan guru untuk menjadikan seorang guru yang lebih kreatif dalam pembelajaran pada peserta didiknya, sehingga kejenuhan siswa terhadap pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkurang. Dalam hal ini persepsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk moral dapat terlaksana, apabila mampu membentuk watak dan karakter siswa menjadi pribadi yang paham dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dilakukan oleh siswa SMAN 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, sikap dan perikunya tidak sesuai dengan apa yang terkandung pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Siswa Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Pelajaran Pembentuk Moral (Studi Kasus di SMAN 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara) Tahun Pelajaran 2016/2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan, maka sebelum merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu peneliti mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

- A. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentukan moral siswa.
- B. Upaya-upaya guru PKn dalam meningkatkan moral siswa.
- C. Rendahnya kecintaan siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- D. Siswa yang masih meremehkan Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan sarana pembentukan moral bangsa Indonesia.
- E. Banyak siswa menganggap belajar Pendidikan Kewarganegaraan tidak menarik.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka peneliti memberikan batasan masalah. Peneliti hanya membahas persepsi siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk moral di Kelas X SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, yaitu bagaimana persepsi siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk moral di SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara ilmiah, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk moral di SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk moral di SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk menambah khasanah bagi dunia pendidikan, untuk menambah informasi bagi dosen, serta untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi guru

Bagi guru SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara khususnya guru PKn dapat menjadi bahan masukan atas pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk moral yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan akhlak yang baik.

2. Bagi Siswa

Bagi siswa SMA Negeri 1 Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengembangkan pengetahuan persepsinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pembentuk moral.